

Transformasi Kebijakan Pendidikan Nasional: Analisis Historis dan Implikasinya terhadap Sistem Pendidikan Indonesia

Edy Kisyanto

Universitas Al-Hikmah Indonesia

Article History

Received : 05 May 2025
Revised : 09 June 2025
Accepted : 27 August 2025
Published : 27 August 2025

Corresponding author*:
edy.kisyanto@gmail.com

Cite This Article:

Edy Kisyanto. (2025). Transformasi Kebijakan Pendidikan Nasional: Analisis Historis dan Implikasinya terhadap Sistem Pendidikan Indonesia. *Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan*, 4(2), 59–71.

DOI:

<https://doi.org/10.56127/jushpen.v4i2.2588>

Abstract: This study examines the historical transformation of Indonesia's national education policies and their implications for the current education system. Using a qualitative descriptive approach with historical analysis, this research traces policy changes from the colonial period, the early independence era, the centralized education system of the New Order, to the decentralization reforms of the post-1998 era. The findings reveal that each period left distinct legacies influencing curriculum design, governance, teacher quality, and access to education. The recent Merdeka Belajar initiative and the 2024 Kurikulum Merdeka mark a significant paradigm shift towards flexible, competency-based education aligned with 21st-century skills. However, challenges persist, including disparities in teacher readiness, regional capacity gaps, and unequal access to resources. The study highlights the importance of historical analysis in understanding the roots of current systemic issues and emphasizes the need for sustainable, inclusive policies that balance national standards with local autonomy. These insights provide a critical foundation for designing future education reforms that are context-sensitive and oriented toward equitable human capital development.

Keywords: education policy, historical analysis, decentralization, Indonesia.

PENDAHULUAN

Pendidikan nasional merupakan fondasi utama dalam pembangunan bangsa karena berperan membentuk masyarakat berpengetahuan, berkarakter, dan berdaya saing. Ramadhani (2024) menegaskan bahwa pendidikan adalah pilar utama pembangunan bangsa yang menjadi indikator kemajuan peradaban. Hermanto (2023) juga menekankan bahwa sistem pendidikan nasional yang efektif—yang menjamin pemerataan, mutu, dan efisiensi—merupakan prasyarat dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas warga negara.

Kebijakan pendidikan memiliki peran sentral dalam membentuk sumber daya manusia (SDM) yang adaptif dan kompetitif. Penelitian Tia Fajartriani et al. (2024) menunjukkan adanya hubungan positif dan signifikan antara kebijakan pendidikan yang baik dengan peningkatan kualitas SDM. Siregar et al. (2024) menambahkan bahwa kebijakan pendidikan berbasis digital dan inovasi sangat diperlukan untuk menciptakan SDM yang mampu menjawab tantangan era Smart Society 5.0. Hal ini sejalan dengan temuan yang menyebutkan bahwa kebijakan pendidikan yang relevan dengan kebutuhan industri dapat meningkatkan daya saing nasional di tingkat global.

Kebijakan pendidikan nasional tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial dan politik. Dalam era otonomi daerah dan reformasi, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi krusial untuk menjamin pemerataan pendidikan. Menurut Chanifudin et al. (2024), kebijakan pendidikan di Indonesia bukan hanya berorientasi pada transfer pengetahuan, tetapi juga pada pembentukan moralitas, identitas kebangsaan, dan stabilitas sosial-politik. Dengan demikian, pendidikan memiliki peran strategis dalam menjaga integrasi nasional di tengah dinamika politik yang berubah.

Perjalanan kebijakan pendidikan nasional Indonesia tidak dapat dilepaskan dari dinamika sejarah bangsa itu sendiri. Sejak era kolonial, pendidikan dirancang bukan untuk mencerdaskan rakyat, melainkan memenuhi kepentingan politik dan ekonomi penjajah. Pada masa pemerintahan Belanda, akses pendidikan dibatasi untuk kalangan tertentu, terutama bangsawan, dengan tujuan mencetak tenaga administrasi rendah guna mendukung birokrasi kolonial (Cahyanti, 2021). Masa pendudukan Jepang membawa perubahan orientasi, di mana pendidikan digunakan sebagai alat propaganda untuk membentuk loyalitas kepada pemerintah militer Jepang (Anggoro et al., 2020).

Pasca-kemerdekaan, pendidikan menjadi instrumen utama pembentukan identitas nasional. Namun, keterbatasan infrastruktur, tenaga pengajar, dan sumber daya membuat implementasi kebijakan pendidikan nasional berjalan lambat (Cahyanti, 2021). Pada era Orde Baru, pemerintah memusatkan kontrol pendidikan melalui kebijakan sentralisasi dan standarisasi kurikulum. Program wajib belajar enam tahun, yang kemudian ditingkatkan menjadi sembilan tahun, berhasil memperluas akses pendidikan dasar bagi masyarakat (Belibis.com, 2025). Namun, pendekatan yang sangat terpusat ini seringkali mengabaikan keberagaman lokal dan kebutuhan spesifik tiap daerah.

Era Reformasi membawa paradigma baru dengan desentralisasi pendidikan melalui undang-undang otonomi daerah. Pemerintah daerah diberi kewenangan lebih besar dalam pengelolaan sekolah dan pengembangan kurikulum lokal. Desentralisasi ini diharapkan mampu meningkatkan relevansi pendidikan dengan potensi daerah masing-masing (Cahyanti, 2021). Meski demikian, praktik di lapangan menunjukkan tantangan baru, terutama dalam menjaga standar mutu yang konsisten di seluruh wilayah Indonesia.

Selain itu, salah satu isu besar yang muncul adalah inkonsistensi kebijakan akibat pergantian rezim dan menteri pendidikan. Pergantian kurikulum yang terlalu sering, seperti perubahan sistem penjurusan SMA atau revisi berulang pada standar kurikulum nasional, menimbulkan ketidakpastian di kalangan guru dan peserta didik (Napitupulu et al., 2025). Inkonsistensi ini bukan hanya berdampak pada proses pembelajaran, tetapi juga pada pengelolaan sekolah dan perencanaan sumber daya pendidikan secara jangka panjang.

Masalah lain yang tidak kalah penting adalah kesenjangan akses pendidikan antarwilayah. Meskipun program wajib belajar dan berbagai kebijakan pemerataan telah diluncurkan, perbedaan fasilitas pendidikan, kualitas guru, dan infrastruktur antara wilayah perkotaan dan pedesaan tetap signifikan. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa keterbatasan akses internet dan fasilitas digital di daerah terpencil semakin memperdalam ketimpangan ini di era pembelajaran berbasis teknologi (ResearchGate, 2024). Kondisi ini menegaskan bahwa kebijakan

pendidikan nasional harus mempertimbangkan konteks geografis dan sosial agar dapat mencapai tujuan pemerataan secara nyata.

Menelusuri transformasi kebijakan pendidikan dari masa ke masa menjadi penting karena kebijakan pendidikan bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri, tetapi selalu dipengaruhi oleh konteks sosial, politik, dan ekonomi setiap periode. Setiap era meninggalkan jejak berupa aturan, kurikulum, serta pola manajemen yang membentuk wajah pendidikan Indonesia saat ini. Studi historis mampu mengungkap bagaimana kebijakan yang lahir pada masa kolonial, kemerdekaan, Orde Baru, hingga Reformasi memiliki dampak berlapis yang masih terasa dalam sistem pendidikan kontemporer (MH et al., 2022). Pemahaman atas perjalanan ini membantu melihat akar persoalan seperti inkonsistensi kebijakan, kesenjangan akses, hingga pergeseran orientasi kurikulum.

Kajian historis juga memberikan kerangka analitis untuk memahami mengapa masalah-masalah tertentu terus berulang dalam pendidikan nasional. Faharani (2021) mencatat bahwa setiap kebijakan baru sering kali membawa semangat perubahan, tetapi tetap terikat dengan warisan struktural dari kebijakan sebelumnya. Pergulatan antara sentralisasi dan desentralisasi, misalnya, merupakan pola historis yang muncul berulang kali dan memengaruhi distribusi kewenangan serta mutu pendidikan. Dengan menelaah sejarah, kita dapat mengidentifikasi pola keberhasilan dan kegagalan kebijakan untuk menghindari pengulangan kesalahan yang sama.

Pendekatan historis juga relevan dalam merancang kebijakan pendidikan yang berkelanjutan. Kebijakan yang hanya merespons masalah sesaat cenderung tidak bertahan lama dan menimbulkan ketidakkonsistenan. Dengan analisis historis, pembuat kebijakan memiliki basis empiris untuk merancang strategi jangka panjang yang adaptif terhadap perubahan sosial-politik, namun tetap berpijak pada pengalaman masa lalu (Newcomers Cuerna Journal, 2024). Pendekatan ini memungkinkan kebijakan tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga proaktif dalam membangun sistem pendidikan yang lebih stabil, inklusif, dan relevan untuk masa depan.

Kajian mengenai kebijakan pendidikan di Indonesia memang telah banyak dilakukan, namun sebagian besar masih bersifat deskriptif dan berfokus pada satu periode tertentu. Penelitian yang menghubungkan sejarah kebijakan dengan dampak jangka panjang terhadap sistem pendidikan nasional masih sangat terbatas. Widiastuti (2025) menegaskan bahwa sebagian besar studi menyoroti implementasi kebijakan masa kini, tetapi jarang menganalisis bagaimana kebijakan di masa lalu membentuk fondasi atau bahkan menciptakan hambatan struktural dalam sistem pendidikan saat ini.

Kurangnya pendekatan longitudinal menyebabkan pemahaman kita terhadap transformasi pendidikan nasional menjadi terfragmentasi. Solehudin et al. (2024) misalnya, meneliti implementasi Kurikulum Merdeka pada tingkat sekolah menengah dan menemukan berbagai tantangan dalam kesiapan guru serta fasilitas. Namun, kajian tersebut tidak mengaitkan temuan dengan pola kebijakan kurikulum sebelumnya seperti KTSP atau Kurikulum 2013. Padahal, analisis historis seperti ini dapat memberikan wawasan lebih mendalam tentang kesiapan sistem pendidikan menghadapi perubahan kebijakan yang berulang.

Ishak (2023) menambahkan bahwa penelitian kebijakan pendidikan seharusnya tidak berhenti pada deskripsi kebijakan, melainkan harus melibatkan analisis dampak secara retrospektif dan prospektif. Dengan melihat kebijakan dalam konteks sejarah panjangnya, peneliti dapat mengidentifikasi pola kegagalan dan keberhasilan yang dapat dijadikan pijakan untuk merancang kebijakan berkelanjutan. Pendekatan ini penting agar kebijakan pendidikan tidak sekadar reaktif terhadap tantangan saat ini, tetapi juga memiliki arah strategis untuk menjawab kebutuhan jangka panjang bangsa.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan analisis historis. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian adalah menelusuri perjalanan kebijakan pendidikan nasional Indonesia dari masa ke masa serta menganalisis implikasinya terhadap sistem pendidikan kontemporer. Metode historis memungkinkan peneliti untuk memahami konteks sosial, politik, dan ekonomi di balik lahirnya setiap kebijakan serta menafsirkan pola keberhasilan dan kegagalannya dalam jangka panjang (Sugiyono, 2021).

Data utama dalam penelitian ini berasal dari dokumen resmi kebijakan pendidikan seperti Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, serta naskah akademik yang terkait. Selain itu, arsip sejarah pendidikan—termasuk catatan periode kolonial, kemerdekaan, Orde Baru, hingga Reformasi—digunakan untuk menelusuri perkembangan kebijakan secara kronologis. Literatur akademik terbaru (2020–2025) dari jurnal-jurnal pendidikan juga menjadi sumber sekunder untuk memperkaya analisis dengan perspektif teoritis dan temuan penelitian sebelumnya.

Data dianalisis menggunakan metode analisis konten (content analysis) untuk mengidentifikasi tema-tema utama dalam dokumen kebijakan dan literatur. Teknik ini membantu menemukan pola, orientasi, serta perubahan kebijakan sepanjang periode sejarah. Selanjutnya dilakukan komparasi historis, yaitu membandingkan kebijakan pada setiap periode untuk melihat kesinambungan maupun pergeseran arah kebijakan pendidikan nasional. Proses analisis dilakukan secara induktif dengan menekankan interpretasi berbasis data dan konteks sejarah (Krippendorff, 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Periode Transformasi Kebijakan Pendidikan

Masa pra-kemerdekaan: pendidikan kolonial dan kebijakan diskriminatif

Sejarah pendidikan Indonesia pada masa pra-kemerdekaan memperlihatkan bagaimana kebijakan pendidikan dibentuk untuk kepentingan kekuasaan kolonial, bukan untuk mencerdaskan rakyat. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, pendidikan dirancang sebagai alat politik untuk mempertahankan kontrol sosial dan ekonomi. Akses pendidikan sangat dibatasi melalui sistem kasta sosial. Sekolah seperti Europeesche Lagere School (ELS) hanya diperuntukkan bagi anak-anak Eropa, sementara pribumi hanya dapat mengakses Hollandsch-Inlandsche School (HIS) jika memiliki status sosial tertentu atau berasal dari keluarga pegawai pemerintah kolonial (Cahyanti, 2021). Sistem ini menghasilkan stratifikasi sosial

yang tajam, di mana pendidikan menjadi instrumen reproduksi kelas dan bukan alat mobilitas sosial.

Tujuan utama pendidikan kolonial bukanlah pengembangan pengetahuan atau kemandirian bangsa, tetapi penyediaan tenaga administrasi tingkat rendah untuk menopang birokrasi Belanda. Kurikulum yang diterapkan menekankan keterampilan praktis, kepatuhan, dan disiplin administratif, sementara aspek pengembangan kritis dan wawasan kebangsaan diabaikan (Anggoro et al., 2020). Kebijakan ini bersifat diskriminatif baik dari segi akses maupun isi pendidikan. Bagi mayoritas rakyat pribumi, kesempatan memperoleh pendidikan formal sangat terbatas sehingga tingkat literasi rendah menjadi warisan panjang masa kolonial.

Ketika Jepang menduduki Indonesia pada 1942, orientasi kebijakan pendidikan bergeser namun tetap sarat muatan politik. Jepang menutup sekolah-sekolah Belanda dan mewajibkan penggunaan bahasa Jepang sebagai bahasa pengantar. Pendidikan dijadikan alat propaganda untuk membentuk loyalitas kepada pemerintah militer Jepang. Pelajaran sejarah dan kebudayaan diarahkan untuk mananamkan konsep Asia Timur Raya dan semangat pengorbanan demi kepentingan Jepang (Suharto, 2022). Meskipun pendudukan Jepang relatif singkat, pendekatan politis dalam pendidikan memperkuat pola bahwa kebijakan pendidikan selalu erat kaitannya dengan kepentingan kekuasaan.

Warisan pendidikan pra-kemerdekaan meninggalkan beberapa dampak jangka panjang bagi Indonesia. Pertama, struktur sosial yang timpang akibat diskriminasi akses pendidikan menciptakan kesenjangan literasi antara kelas bangsawan dan rakyat kebanyakan. Kedua, orientasi kurikulum yang lebih menekankan kepatuhan dan keterampilan administratif meninggalkan sistem pendidikan yang tidak dirancang untuk membangun kemandirian intelektual bangsa. Ketiga, politisasi pendidikan pada masa kolonial maupun Jepang membentuk pola di mana kebijakan pendidikan selalu menjadi instrumen ideologi negara, sesuatu yang masih terlihat hingga masa pasca-kemerdekaan (Siregar et al., 2024).

Analisis historis terhadap masa pra-kemerdekaan menunjukkan bahwa tantangan besar pasca-1945 bukan hanya membangun sekolah atau kurikulum baru, tetapi juga merombak struktur sosial, budaya pendidikan, dan pola pikir yang dibentuk oleh kebijakan diskriminatif selama ratusan tahun. Transformasi kebijakan pendidikan nasional kemudian berangkat dari kebutuhan untuk membalikkan warisan kolonial tersebut: menjadikan pendidikan bukan hanya hak istimewa segelintir orang, tetapi hak seluruh warga negara untuk membangun peradaban bangsa.

Masa kemerdekaan awal: pembentukan sistem pendidikan nasional

Pasca-proklamasi 1945, pendidikan menjadi salah satu pilar utama pembangunan bangsa. Para pendiri negara memandang pendidikan sebagai sarana untuk membentuk identitas nasional, mananamkan nilai kebangsaan, dan membebaskan masyarakat dari warisan diskriminasi kolonial. Periode ini ditandai dengan lahirnya kebijakan-kebijakan awal yang menjadi fondasi sistem pendidikan nasional, sekaligus upaya besar untuk merombak struktur pendidikan kolonial yang elitis menjadi sistem yang inklusif dan berorientasi pada seluruh rakyat.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah menjadi tonggak penting dalam sejarah pendidikan Indonesia. UU ini menegaskan bahwa pendidikan adalah hak seluruh warga negara, tanpa membedakan status sosial maupun latar belakang etnis. Kebijakan ini sekaligus menegaskan perubahan paradigma pendidikan: dari alat kekuasaan kolonial menjadi instrumen pembangunan nasional (Suwarno, 2021). Isi undang-undang ini juga menekankan integrasi antara aspek intelektual, moral, dan kebangsaan dalam kurikulum pendidikan.

Namun, tantangan besar muncul dalam implementasinya. Keterbatasan infrastruktur, kurangnya guru terlatih, serta dampak perang kemerdekaan membuat pelaksanaan kebijakan pendidikan awal ini berjalan tidak merata. Banyak sekolah menggunakan bangunan darurat, buku pelajaran terbatas, dan metode pengajaran yang masih beragam karena transisi dari sistem kolonial (Wijaya & Prasetya, 2023). Meski demikian, semangat membangun sistem pendidikan nasional yang merata terus menjadi fokus utama pemerintah.

Pada masa ini pula dilakukan upaya untuk membentuk kurikulum nasional yang mencerminkan nilai-nilai kebangsaan. Kurikulum 1947, yang dikenal sebagai Rencana Pelajaran 1947, merupakan kurikulum nasional pertama. Fokusnya bukan hanya pada penguasaan pengetahuan, tetapi juga pada penanaman semangat kebangsaan, demokrasi, dan pembangunan karakter. Hal ini sangat berbeda dengan kurikulum kolonial yang lebih menekankan keterampilan administratif untuk kepentingan birokrasi penjajah (Cahyanti, 2021).

Selain itu, masa kemerdekaan awal juga ditandai dengan usaha pemerintah untuk memperluas akses pendidikan dasar. Pemerintah memperkenalkan kebijakan wajib belajar enam tahun meskipun penerapannya masih bertahap karena keterbatasan sumber daya. Program ini menunjukkan tekad pemerintah untuk menjadikan pendidikan sebagai hak dasar rakyat dan alat pemerataan kesempatan sosial (Siregar et al., 2024).

Warisan dari periode ini sangat signifikan. Pertama, diletakkannya dasar hukum dan filosofi pendidikan nasional yang berorientasi pada Pancasila dan UUD 1945. Kedua, pembentukan kurikulum nasional pertama yang memprioritaskan nilai kebangsaan. Ketiga, kesadaran kolektif bahwa pendidikan adalah sarana utama membangun identitas bangsa. Meskipun banyak tantangan, periode ini menandai transformasi besar dari pendidikan kolonial yang diskriminatif menuju sistem pendidikan nasional yang berupaya inklusif.

Orde Baru: sentralisasi kurikulum dan pembangunan SDM

Era Orde Baru (1966–1998) menjadi salah satu fase paling signifikan dalam sejarah kebijakan pendidikan Indonesia. Pemerintah pada masa ini menempatkan pendidikan sebagai alat utama untuk mendukung agenda pembangunan nasional. Strategi pembangunan jangka panjang yang dikenal sebagai REPELITA (Rencana Pembangunan Lima Tahun) menekankan pendidikan sebagai sarana membentuk sumber daya manusia (SDM) yang produktif, disiplin, dan sesuai dengan kebutuhan industrialisasi (Tilaar, 2022).

Salah satu ciri utama kebijakan pendidikan Orde Baru adalah sentralisasi kurikulum. Pemerintah berusaha mengontrol arah pendidikan nasional melalui kurikulum seragam yang diterapkan di seluruh Indonesia. Kurikulum 1968

menekankan pembentukan manusia Pancasila yang patuh pada negara, diikuti Kurikulum 1975 dan 1984 yang semakin menekankan pada aspek keterampilan dasar serta efisiensi pembelajaran (Wijaya & Prasetya, 2023). Meskipun pendekatan ini berhasil menjaga keseragaman standar pendidikan nasional, banyak kritik menyebut bahwa sentralisasi mengabaikan keberagaman konteks sosial-budaya daerah dan membatasi inovasi guru di lapangan.

Program wajib belajar enam tahun yang diluncurkan pada 1984 merupakan langkah besar dalam pemerataan pendidikan dasar. Pemerintah berhasil meningkatkan angka partisipasi sekolah dasar secara signifikan, yang kemudian dilanjutkan dengan program wajib belajar sembilan tahun di akhir era Orde Baru. Upaya ini menunjukkan fokus pemerintah dalam meningkatkan kuantitas akses pendidikan sebagai bagian dari pembangunan SDM (Siregar et al., 2024).

Di sisi lain, pendidikan pada masa ini juga diarahkan untuk mendukung stabilitas politik. Mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP) diperkuat sebagai instrumen ideologisasi negara. Pendidikan tidak hanya dilihat sebagai sarana pembangunan ekonomi, tetapi juga sebagai alat kontrol sosial. Tilaar (2022) mencatat bahwa kebijakan ini menciptakan SDM yang disiplin dan terstruktur, namun kurang menumbuhkan daya kritis dan kreativitas karena kurikulum sangat kaku dan terpusat pada pemerintah pusat.

Warisan Orde Baru terhadap pendidikan Indonesia bersifat ambivalen. Di satu sisi, periode ini berhasil membangun fondasi pemerataan akses pendidikan dasar dan memperkuat manajemen sekolah secara administratif. Di sisi lain, pendekatan sentralisasi meninggalkan tantangan berupa kurangnya fleksibilitas kurikulum, ketergantungan pada pemerintah pusat, serta rendahnya perhatian terhadap kebutuhan lokal. Transformasi pendidikan pada era Reformasi kemudian banyak berupaya mengoreksi pola-pola ini melalui desentralisasi pendidikan dan pengembangan kurikulum berbasis kompetensi.

Era Reformasi: desentralisasi pendidikan dan otonomi daerah

Era Reformasi yang dimulai pada 1998 menandai perubahan mendasar dalam arah kebijakan pendidikan nasional. Jika pada masa Orde Baru pendidikan sangat tersentralisasi di tangan pemerintah pusat, maka pada era ini kebijakan berfokus pada desentralisasi pendidikan sejalan dengan penerapan otonomi daerah. Paradigma baru ini lahir dari kesadaran bahwa pengelolaan pendidikan yang terpusat tidak mampu menjawab keragaman kebutuhan sosial-budaya di daerah serta kurang responsif terhadap masalah lokal (Mustari & Rahman, 2022).

Puncak dari perubahan ini adalah lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian direvisi menjadi UU Nomor 32 Tahun 2004. Kebijakan ini memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah dalam mengelola pendidikan, mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan program pendidikan. Pemerintah pusat berperan menetapkan standar nasional, sementara daerah bertanggung jawab terhadap implementasi sesuai dengan karakteristik lokal (Setiawan, 2023).

Salah satu wujud konkret desentralisasi adalah pengenalan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Melalui MBS, sekolah diberi otonomi dalam pengelolaan sumber daya, kurikulum tingkat satuan pendidikan, serta pelibatan masyarakat melalui komite sekolah. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi

publik dan akuntabilitas sekolah, sekaligus mendorong inovasi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa di masing-masing daerah (Rukmana, 2021).

Desentralisasi pendidikan juga berdampak pada pengembangan kurikulum. Setelah era kurikulum nasional yang seragam, pemerintah memperkenalkan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) 2004 dan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2006 yang memberi ruang lebih besar bagi sekolah untuk menyesuaikan materi ajar dengan konteks lokal. Hal ini dilanjutkan dengan Kurikulum 2013 dan terbaru Kurikulum Merdeka, yang keduanya menekankan fleksibilitas serta penguatan karakter dan kompetensi peserta didik (Wijaya & Prasetya, 2023).

Namun, pelaksanaan desentralisasi tidak lepas dari tantangan. Ketimpangan kapasitas manajemen antar daerah menimbulkan disparitas kualitas pendidikan. Daerah dengan sumber daya ekonomi tinggi dapat melaksanakan kebijakan lebih optimal dibanding daerah tertinggal. Selain itu, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah sering kali menghadapi hambatan administratif, sehingga beberapa kebijakan berjalan tidak sinkron (Mustari & Rahman, 2022).

Meski demikian, era Reformasi membawa paradigma baru dalam pendidikan: bahwa kualitas pendidikan nasional harus dibangun dari bawah melalui pemberdayaan sekolah dan partisipasi masyarakat. Desentralisasi tidak hanya mengubah tata kelola pendidikan, tetapi juga memaksa negara untuk mengakui keragaman kebutuhan daerah sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional.

Kebijakan terbaru: Merdeka Belajar dan kurikulum 2024

Transformasi besar dalam kebijakan pendidikan Indonesia pada beberapa tahun terakhir diwujudkan melalui program Merdeka Belajar dan penerapan Kurikulum 2024 atau lebih dikenal sebagai Kurikulum Merdeka. Kebijakan ini lahir sebagai respons terhadap kebutuhan sistem pendidikan yang lebih fleksibel, adaptif, dan relevan dengan perkembangan zaman. Berbeda dengan kurikulum sebelumnya yang cenderung seragam, Kurikulum Merdeka memberikan keleluasaan kepada sekolah dan guru untuk menyesuaikan pembelajaran sesuai konteks lokal, kemampuan siswa, serta tantangan abad ke-21 (Kemendikbudristek, 2024).

Penetapan Permendikbudristek Nomor 12 Tahun 2024 menandai langkah resmi pemerintah menjadikan Kurikulum Merdeka sebagai kurikulum nasional. Kebijakan ini didasarkan pada hasil uji coba sejak 2020 yang menunjukkan peningkatan signifikan pada literasi, numerasi, serta kualitas proses pembelajaran di sekolah-sekolah yang menerapkannya. Evaluasi Asesmen Nasional 2023 bahkan mengindikasikan bahwa sekolah yang mengadopsi Kurikulum Merdeka lebih inklusif dan mampu memberikan ruang bagi penguatan karakter siswa dibandingkan dengan kurikulum sebelumnya (Wijaya & Prasetya, 2023).

Secara konseptual, Kurikulum Merdeka dirancang untuk mengurangi beban materi ajar yang terlalu padat dan menekankan penguasaan kompetensi esensial. Guru didorong untuk menggunakan asesmen formatif, pembelajaran berbasis proyek, serta integrasi literasi digital dan sosial. Pendekatan ini dipandang sebagai upaya menyiapkan generasi yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga adaptif, kreatif, dan memiliki kesadaran sosial (Rukmana, 2024).

Namun, implementasi kebijakan ini tidak lepas dari tantangan. Salah satu persoalan utama adalah kesenjangan kesiapan guru dan sekolah, terutama di daerah

dengan keterbatasan infrastruktur. Beberapa guru senior merasa kesulitan beradaptasi dengan perubahan paradigma pembelajaran, sementara sekolah di daerah terpencil menghadapi hambatan teknis dalam menerapkan metode berbasis proyek dan teknologi. Selain itu, kebebasan kurikulum yang terlalu luas juga memunculkan kekhawatiran akan inkonsistensi standar kompetensi antar sekolah (Mustari & Rahman, 2023).

Meskipun demikian, kebijakan Merdeka Belajar mencerminkan pergeseran besar dalam filosofi pendidikan nasional: dari sistem yang tersentralisasi menuju sistem yang menghargai keragaman konteks lokal dan otonomi sekolah. Kurikulum 2024 tidak hanya membawa perubahan pada struktur pembelajaran, tetapi juga menawarkan visi baru pendidikan Indonesia yang lebih partisipatif, relevan, dan berorientasi pada pengembangan karakter bangsa.

Implikasi terhadap Sistem Pendidikan Indonesia

Perubahan kurikulum dan standar kompetensi

Transformasi kebijakan pendidikan melalui Kurikulum Merdeka dan program Merdeka Belajar membawa implikasi besar terhadap arah sistem pendidikan Indonesia. Salah satu dampak utama adalah perubahan paradigma kurikulum dari model seragam yang kaku menuju sistem yang lebih fleksibel dan berbasis kompetensi. Jika pada era sebelumnya kurikulum didominasi oleh target penguasaan materi, kini fokus bergeser pada pengembangan kompetensi esensial seperti literasi, numerasi, pemecahan masalah, dan karakter. Pergeseran ini menuntut peran guru untuk tidak hanya menjadi penyampai informasi, tetapi juga fasilitator yang mendampingi siswa membangun keterampilan abad ke-21 (Rukmana, 2024).

Perubahan standar kompetensi juga memiliki konsekuensi luas terhadap perencanaan pendidikan nasional. Standar yang lebih adaptif mendorong sekolah mengembangkan pembelajaran kontekstual sesuai dengan kebutuhan lokal. Hal ini membuka peluang pemerataan kualitas pendidikan di daerah yang sebelumnya tertinggal karena kurikulum nasional yang seragam kurang memperhatikan konteks sosial-budaya setempat (Mustari & Rahman, 2023).

Di sisi lain, penerapan kurikulum berbasis kompetensi menuntut evaluasi ulang sistem asesmen. Asesmen Nasional yang berbasis literasi dan numerasi menjadi langkah awal menuju sistem evaluasi yang tidak hanya mengukur hafalan materi, tetapi juga kemampuan analisis, kreativitas, dan kolaborasi siswa. Dengan demikian, perubahan kurikulum tidak hanya menggeser isi pembelajaran, tetapi juga cara negara menilai kualitas pendidikan itu sendiri (Kemendikbudristek, 2024).

Meskipun membawa potensi positif, perubahan ini juga menghadirkan tantangan. Tidak semua sekolah memiliki sumber daya untuk mengimplementasikan pembelajaran berbasis proyek atau memberikan asesmen formatif yang sesuai. Kesenjangan infrastruktur dan kualitas guru dapat menimbulkan disparitas baru jika tidak diimbangi dengan kebijakan pendukung, seperti pelatihan berkelanjutan dan peningkatan sarana pendidikan (Wijaya & Prasetya, 2023).

Dampak terhadap pemerataan akses pendidikan

Perubahan kebijakan pendidikan melalui program Merdeka Belajar dan penerapan Kurikulum Merdeka memiliki dampak signifikan terhadap upaya pemerataan akses pendidikan di Indonesia. Selama beberapa dekade, tantangan terbesar sistem pendidikan nasional adalah kesenjangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan, daerah maju dan tertinggal, serta perbedaan akses antar kelompok sosial-ekonomi. Kebijakan baru ini dirancang untuk mengatasi ketimpangan tersebut dengan memberikan fleksibilitas bagi sekolah dan daerah dalam merancang pembelajaran sesuai dengan konteks lokal (Mustari & Rahman, 2023).

Salah satu upaya konkret adalah penerapan Kurikulum Merdeka di lebih dari 3.000 sekolah di daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal) sejak tahap awal implementasi. Langkah ini bertujuan memastikan bahwa inovasi pendidikan tidak hanya dinikmati sekolah di perkotaan, tetapi juga menjangkau daerah dengan keterbatasan sumber daya. Dengan kurikulum yang lebih sederhana dan fokus pada kompetensi esensial, sekolah di daerah dengan fasilitas terbatas tetap dapat menjalankan pembelajaran yang bermakna (Kemendikbudristek, 2024).

Elain itu, program Merdeka Belajar menekankan penggunaan platform digital seperti Merdeka Mengajar untuk menyediakan materi ajar, pelatihan guru, dan sumber belajar yang dapat diakses secara gratis. Strategi ini diharapkan mampu mengurangi kesenjangan kualitas pengajaran antara sekolah di daerah perkotaan dan pedesaan. Namun, ketersediaan infrastruktur internet dan perangkat teknologi masih menjadi kendala utama dalam pemerataan akses ini, terutama di wilayah timur Indonesia (Rukmana, 2024).

Dampak positif lain adalah meningkatnya partisipasi masyarakat melalui manajemen berbasis sekolah dan kurikulum kontekstual. Dengan melibatkan komunitas lokal dalam pengelolaan pendidikan, kebijakan ini mendorong rasa kepemilikan bersama terhadap sekolah, yang pada gilirannya memperkuat dukungan sosial terhadap akses pendidikan di daerah terpencil (Setiawan, 2023).

Namun, tantangan pemerataan tetap ada. Ketimpangan sumber daya manusia, kualitas guru, dan fasilitas fisik dapat menyebabkan implementasi kebijakan yang tidak merata. Jika tidak diimbangi dengan intervensi afirmatif seperti distribusi guru berkualitas, peningkatan sarana, dan dukungan anggaran khusus untuk daerah tertinggal, kebijakan ini berpotensi memperluas kesenjangan antara sekolah dengan kemampuan adaptasi tinggi dan yang masih tertinggal (Wijaya & Prasetya, 2023).

Pengaruh terhadap kualitas guru dan tenaga kependidikan

Transformasi kebijakan pendidikan melalui program Merdeka Belajar dan penerapan Kurikulum Merdeka memberikan dampak signifikan terhadap kualitas guru dan tenaga kependidikan. Salah satu inti kebijakan ini adalah memberikan peran sentral kepada guru sebagai fasilitator pembelajaran yang fleksibel dan berbasis kompetensi. Pergeseran paradigma ini menuntut peningkatan kapasitas profesional guru, baik dalam hal pedagogik, penguasaan teknologi, maupun kemampuan merancang pembelajaran kontekstual (Rukmana, 2024).

Program Merdeka Mengajar hadir sebagai instrumen pendukung utama untuk meningkatkan kompetensi guru. Platform ini menyediakan pelatihan daring, modul ajar, serta sarana asesmen diagnostik yang dapat digunakan guru secara

gratis. Dampaknya cukup nyata: data Kemendikbudristek (2024) menunjukkan bahwa sekolah yang aktif menggunakan platform ini mengalami peningkatan kualitas praktik mengajar dan hasil belajar siswa secara signifikan dibanding sekolah yang belum memanfaatkannya secara optimal.

Namun, tantangan besar muncul terkait kesenjangan kompetensi guru antar wilayah. Guru di daerah perkotaan lebih mudah mengakses pelatihan, internet, dan perangkat teknologi, sementara guru di daerah 3T menghadapi keterbatasan yang menghambat adaptasi terhadap Kurikulum Merdeka. Mustari dan Rahman (2023) menekankan bahwa tanpa strategi afirmatif seperti distribusi sumber daya pelatihan dan pendampingan intensif, kebijakan ini berisiko memperlebar kesenjangan kualitas guru.

Selain guru, tenaga kependidikan seperti kepala sekolah dan pengawas juga terdampak oleh kebijakan desentralisasi. Dengan manajemen berbasis sekolah, peran kepemimpinan sekolah menjadi lebih strategis dalam merancang kurikulum tingkat satuan pendidikan, mengelola sumber daya, dan membangun kolaborasi dengan masyarakat. Hal ini menuntut kapasitas manajerial dan kepemimpinan pendidikan yang lebih tinggi dibanding era kurikulum sentralistik (Setiawan, 2023).

Di sisi positif, kebijakan ini membuka ruang bagi guru untuk lebih kreatif dan inovatif. Dengan beban materi yang lebih ringan dan penekanan pada proyek berbasis konteks, guru memiliki kesempatan mengembangkan pembelajaran sesuai dengan karakter siswa. Ini memberi dampak jangka panjang terhadap kualitas pendidikan, karena guru tidak lagi hanya berperan sebagai penyampai materi, tetapi sebagai agen perubahan yang membentuk keterampilan hidup siswa (Wijaya & Prasetya, 2023).

Implikasi terhadap pengelolaan pendidikan di era otonomi daerah

Penerapan desentralisasi pendidikan sejak era Reformasi membawa dampak mendalam terhadap pengelolaan sistem pendidikan di Indonesia. Kebijakan Merdeka Belajar dan Kurikulum Merdeka memperkuat paradigma ini dengan memberikan otonomi yang lebih besar kepada pemerintah daerah dan satuan pendidikan dalam merancang serta mengelola program pembelajaran. Pergeseran ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga filosofis: pendidikan tidak lagi dikelola secara seragam oleh pusat, melainkan disesuaikan dengan kebutuhan lokal dan partisipasi masyarakat (Setiawan, 2023).

Dengan diberlakukannya manajemen berbasis sekolah (MBS) dan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) sebagai cikal bakal desentralisasi, era otonomi daerah memberikan ruang bagi sekolah untuk mengatur kurikulum, alokasi sumber daya, serta melibatkan komite sekolah dalam pengambilan keputusan. Program Merdeka Belajar memperkuat hal ini melalui fleksibilitas kurikulum dan penekanan pada konteks lokal. Akibatnya, pengelolaan pendidikan kini lebih adaptif terhadap kondisi sosial-budaya setiap daerah (Mustari & Rahman, 2023).

Namun, desentralisasi juga menimbulkan tantangan signifikan. Tidak semua pemerintah daerah memiliki kapasitas manajerial, anggaran, atau sumber daya manusia yang memadai untuk mengelola pendidikan secara efektif. Ketimpangan antar daerah menyebabkan kualitas pendidikan masih sangat bervariasi. Dalam beberapa kasus, kebijakan otonomi justru memperlebar

kesenjangan antara daerah maju dengan daerah tertinggal karena perbedaan kemampuan mengimplementasikan kebijakan nasional (Rukmana, 2024).

Di sisi positif, otonomi daerah membuka peluang inovasi. Beberapa pemerintah daerah berhasil mengembangkan model pendidikan kontekstual berbasis budaya lokal dan kebutuhan industri wilayahnya. Ini menunjukkan bahwa dengan pengelolaan yang tepat, desentralisasi dapat memperkuat relevansi pendidikan terhadap pembangunan daerah sekaligus meningkatkan kualitas SDM lokal.

Kebijakan Merdeka Belajar memperlihatkan bahwa keberhasilan pengelolaan pendidikan di era otonomi tidak hanya ditentukan oleh regulasi nasional, tetapi juga oleh sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan sekolah. Penguatan kapasitas manajemen pendidikan daerah melalui pendampingan, alokasi dana afirmatif, serta peningkatan kompetensi tenaga kependidikan menjadi kunci untuk memastikan desentralisasi membawa pemerataan kualitas, bukan kesenjangan baru.

KESIMPULAN DAN SARAN

Transformasi kebijakan pendidikan nasional Indonesia merupakan perjalanan panjang yang mencerminkan dinamika sosial, politik, dan ekonomi bangsa. Dari era kolonial yang sarat diskriminasi, masa awal kemerdekaan yang penuh semangat nation-building, sentralisasi kuat pada masa Orde Baru, hingga desentralisasi dan otonomi pendidikan di era Reformasi, setiap periode meninggalkan jejak kebijakan yang membentuk wajah pendidikan hari ini.

Masuknya paradigma baru melalui Merdeka Belajar dan Kurikulum Merdeka menandai upaya besar dalam membenahi sistem pendidikan agar lebih fleksibel, kontekstual, dan berorientasi pada kompetensi abad ke-21. Kebijakan ini bukan sekadar revisi teknis kurikulum, tetapi sebuah reformasi struktural yang menyentuh aspek manajemen sekolah, peran guru, pemerataan akses, hingga penguatan tata kelola pendidikan daerah.

Namun, berbagai tantangan masih membayangi. Kesenjangan kapasitas antar daerah, kesiapan guru dalam mengadopsi pendekatan baru, serta kebutuhan akan pendampingan kebijakan yang berkelanjutan menjadi agenda penting dalam menjaga keberlanjutan reformasi ini. Oleh karena itu, penting untuk memandang kebijakan pendidikan tidak hanya sebagai produk politik sesaat, tetapi sebagai upaya jangka panjang yang memerlukan konsistensi, evaluasi berbasis data, dan keterlibatan semua pemangku kepentingan.

Melalui pendekatan historis, kita dapat melihat bahwa keberhasilan kebijakan pendidikan tidak semata-mata ditentukan oleh isi kebijakan itu sendiri, tetapi juga oleh konteks pelaksanaannya. Dengan refleksi historis yang tajam, kebijakan pendidikan masa depan dapat dirancang lebih inklusif, adil, dan mampu menjawab tantangan lokal maupun global yang terus berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. [Online]. Available: <https://peraturan.bpk.go.id/Download/33829/UU%20Nomor%2022%20Tahun%201999.pdf>. Accessed: Feb. 14, 2025.

- Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. [Online]. Available: <https://peraturan.bpk.go.id/Download/30504/UU%20Nomor%2032%20Tahun%202004.pdf>. Accessed: Feb. 14, 2025.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. [Online]. Available: <https://peraturan.bpk.go.id/Download/32160/UU%20Nomor%2020%20Tahun%202003.pdf>. Accessed: Feb. 14, 2025.
- Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. [Online]. Available: <https://akhmadsudrajat.files.wordpress.com/2009/04/permendiknas-no-22-tahun-2006.pdf>. Accessed: Feb. 14, 2025.
- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah. [Online]. Available: https://repository.unand.ac.id/20941/1/permendiknas_tahun2013_nomor64.pdf. Accessed: Feb. 14, 2025.
- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 67 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah. [Online]. Available: https://repository.unand.ac.id/20947/1/permendiknas_tahun2013_nomor67.pdf. Accessed: Feb. 14, 2025.
- Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, Peraturan Mendikbudristek Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada PAUD, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Menengah. [Online]. Available: <https://peraturan.go.id/files/permendikbudristek-no-12-tahun-2024.pdf>. Accessed: Feb. 14, 2025.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Rapor Publik Asesmen Nasional 2023. [Online]. Available: <https://data.kemendikdasmen.go.id>. Accessed: Feb. 14, 2026.
- World Bank, Assessing the Role of the School Operational Grant Program (BOS) in Improving Education Outcomes in Indonesia. Washington, DC, 2015.
- World Bank, Implementation of School-Based Management in Indonesia. Washington, DC.
- A. Bandur, “Decentralization and School-Based Management in Indonesia,” *Asia Pacific Journal of Educational Development*, vol. 1, no. 1, pp. 33–47, 2012.
- L. M. A. Z. Puad, “A critical analysis of Indonesia’s 2013 national curriculum,” *Curriculum Journal*, 2023, doi: 10.1002/curj.194.
- M. Desimaria, “Reconnoitring Decentralization Policy of Education in Indonesia,” *Al-Ishlah: Jurnal Pendidikan*, 2022.
- A. Musanna, “Quo Vadis Desentralisasi Pendidikan di Indonesia,” *Islam Futura*, 2011.
- R. Kurniawan and Rakhamawati, “The Impact of School Operational Assistance (BOS) on Student Expenditure and Scores,” *Jurnal Ekonomi Indonesia*, vol. 11, no. 1, pp. 1–11, 2022.